

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2017**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA 2017**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dapat menyelesaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT SKPD) Tahun 2017 yang merupakan Penjabaran dari menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya 2017-2021.

Rencana Kerja Tahunan 2017 memuat kebijakan pembangunan yang diimplementasikan melalui program/kegiatan Dinas Perindustrian dan perdagangan dengan capaian kinerja sasaran berdasarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai.

Semoga dengan telah tersusunya RKT SKPD ini, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2017 dapat dilaksanakan secara efektif dan se-efisien mungkin, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Demikianlah dan pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang telah ikut membantu penyempurnaan RKT SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mudah-mudahan RKT ini dapat memberikan kekuatan hukum yang lebih jelas terimakasih.

Tasikmalaya, Januari 2017

KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN TASIKMALAYA

**Drs. H. HERI SOGIRI, MM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19600805 198603 1 010**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB. I    PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang . .....	1
1.2    Landasan Hukum.....	2
1.3    Maksud dan Tujuan . .....	3
1.4    Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB. II   EVALUASI PELAKSANAAN RKT SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1    Evaluasi Pelaksanaan RKT SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD . ....	6
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan SKPD . .....	6
2.3    Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsinya .....	8
2.4    Prioritas Program dan Pembangunan Tahun 2017 .....	12
2.5    Rencana Kegiatan Tahun 2017.....	12
<b>BAB. III   KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN RENCANA</b>	
3.1    Program/kegiatan Perindag Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 .....	15
3.2    Kibijakan SKPD Tahun Rencana . .....	24
<b>BAB. IV   PENUTUP</b> .....	26

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga pemerintahan untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisiensi, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat . RKT memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Selanjutnya Satuan Kerja perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional. Adapun salah satu dokumen

perencanaan tersebut yaitu RKT yang mempunyai peranan sangat Strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan. RKT SKPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan RKT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 didasarkan pada :

1. Undang -undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dan lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagai mana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 20046 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;

4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
8. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang dana Perimbangan;
10. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintahan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya RKT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 sebagai dokumen Perencanaan jangka pendek yang menjabarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017-2021 sesuai dengan tugas Pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Tujuan disusunnya RKT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan perencanaan Program/kegiatan tahun 2017 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan RKT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 sebagai berikut :

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II           EVALUASI PELAKSANA RKT SKPD TAHUN LALU**

Pada bab ini menjelaskan mengenai evaluasi Pelaksanaan RKT tahun lalu dan capaian RKT, Analisa Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting , penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan , serta Riviui terhadap Rancangan Aawal RKPD ; dan menjelaskan Rencana Kinerja Yang diusulkan dalam Rangka Pencapaian target Sasaran.

##### **BAB III        TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai telaah kebijakan Nasional dan Provinsi , Tujuan dan sasaran SKPD serta Program Kegiatan SKPD.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RKT SKPD TAHUN LALU

**2.1** Evaluasi Pelaksanaan RKT SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016, maka evaluasi pelaksanaan RKT dan capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2016

Dari 5 Program 28 Kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja terlaksana 5 Program dan 28 kegiatan dengan hasil memenuhi target kinerja 100%

- Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016

Dari 28 kegiatan yang mencapai target, 1 indikator yang tidak memenuhi target dan sisanya melebihi target.

### **2.2** Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tasikmalaya selama lima tahun hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat di capai.

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikimalaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran .

**INDIKATOR CAPAIAN KINERJA  
BIDANG PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017**

No	Bidang Urusan Pemerintahan /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal RPJMD	Tahun 2017
1	Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah pembangunan pasar	Pasar	1	1
2	Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Rehabilitasi pasar	Pasar	18	5
3	Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Nilai Ekspor	US\$	3.994.528,16	4.103.107,42
4	Perindustrian dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekspor	%	1	1,40
5	Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Retribusi Pasar	Rp	1.063.042.236	880.264.350
6	Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pembinaan Bagi Pedagang	Pedagang	250	500
7	Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pembinaan Bagi Pengelola Pasar Tradisional	Orang	0	71
8	Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kasus pengaduan konsumen yang diselesaikan	Kasus	1	1
9	Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Alat UTTP yang ditera	Unit	0	18945
10	Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Industri	Unit	15.277	15.630
11	Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pembinaan IKM	Orang	50	245
12	Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan Industri	%	1	1,2
13	Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Sentra industri potensial	Sentra	390	1

### 2.3 Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsinya

Dinas Perindustrian dan perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan Perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Perindag mempunyai peran dan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan teknis kelembagaan, pengembangan sumberdaya, bimbingan usaha dan pemasaran
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan,
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian teknis kelembagaan, pengembangan sumberdaya, bimbingan usaha dan pemasaran;
- e. Penyelenggaraan tata usaha dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selama periode 2017-2021, (Nomenklatur Dinas baru) pelaksanaan kelima peran tersebut telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih terdapat persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana yang diharapkan dengan pelaksanaannya. Dengan demikian, permasalahan sering terjadi dalam hal tidak konsistennya antara aspek rencana/target dengan aspek implementasinya.

Secara rinci identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- Bidang Industri Agro dalam pengembangannya masih menghadapi permasalahan diantaranya :
  1. Diprlukannya peningkatan wawasan, pengetahuan dan kemampuan teknis SDM mengelola Industri kecil dan menengah dalam penumbuhan dan pengembangan industri.
  2. Pengembangan teknologi dilakukan secara tradisional/manual dan idealnya menggunakan teknologi tepat guna (mengadopsi teknologi tinggi sesuai dengan potensi dan kebutuhan).

3. Dukungan kebutuhan peralatan industri sesuai dengan kebutuhan, selama ini peralatan yang digunakan tradisional yang akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas serta memenuhi kebutuhan pasar.
  4. Kontinuitas bahan baku industri masih mendatangkannya dari luar daerah yang berdampak kepada cost produksi terutama dalam mengelolah produksi kerajinan .
  5. Belum memperhatikan legalitas HKI yaitu merk dagang, hak paten, desain industri dan hak cipta sehingga terkendala dan diakui oleh daerah lain.
  6. Belum seluruhnya menerapkan aspek legal formal diantaranya TDI, IUI, SNI, ISO, IMO.
  7. Belum terbangunnya jaringan kemitraan industri kecil, menengah dan besar.
  8. Persaingan produk illegal, belum terintegrasinya rantai pasok industri.
  9. Penambahan bahan berbahaya bagi kesehatan dalam produk makanan dan minuman. Sebagai contoh di industri minuman, tak sedikit orang menilai bahan tambahan pangan didalam produk minuman ringan, seperti pemanis buatan, pengawet, pewarna, dan karbonasi (CO<sup>2</sup>) untuk minum bersoda berbahaya bagi kesehatan.
  10. Kelembagaan usaha industri sesuai dengan regulasi dan ketentuan diperlukan peningkatan seperti kelembagaan Koperasi, kelompok usaha bersama (KUB), dan sentra.
  11. Belum memiliki rencana pembangunan industri Kabupaten (RPIK) sebagai acuan dalam pengembangan industri terutama yang menyangkut perwilayahan industri diantaranya kebutuhan luas kawasan industri dengan minimal 50 Ha dan sentra IKM 5 Ha dalam satu hamparan.
- Bidang Industri Agro dalam pengembangannya masih menghadapi permasalahan diantaranya :
1. Diperlukannya peningkatan pengawasan, pengetahuan dan kemampuan teknis SDM mengelolah bahan industri kecil dan menengah dalam penumbuhan dan pengembangan industri.

2. Pengembangan teknologi dilakukan secara tradisional/manual dan idealnya menggunakan teknologi tepa guna (mengadopsi teknologi tinggi sesuai dengan potensi dan kebutuhan)
  3. Dukungan kebutuhan peralatan industri sesuai dengan kebutuhan, selama ini peralatan yang digunakan tradisional yang akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dan kuantitas serta memenuhi kebutuhan pasar.
  4. Kontinuitas bahan baku industri masih mendatangkan dari luar daerah yang berdampak kepada cost produksi terutama dalam mengolah produksi kerajinan.
  5. Belum memperhatikan legalitas HKI yaitu merk dagang, hak paten, desain industri dan hak cipta sehingga terkendala dan di akui oleh daerah lain.
  6. Belum seluruhnya menerapkan aspek legal formal diantaranya TDI, IUI, SNI, ISO, IMO.
  7. Belum terbangunnya jaringan kemitraan industri kecil, menengah dan besar.
  8. Persaingan produk illegal, belum terintegrasinya rantai pasok industri.
  9. Kelembagaan usaha industri sesuai dengan regulasi dan ketentuan diperlukan peningkatan seperti kelembagaan Koperasi, kelompok usaha bersama (KUB), dan sentra.
  10. Belum memiliki rencana pembangunan industri Kabupaten (RPIK) sebagai acuan dalam pengembangan industri terutama yang menyangkut perwilayahan industri diantaranya kebutuhan luas kawasan industri dengan minimal 50 Ha dan sentra IKM 5 Ha dalam satu hamparan
- Bidang Perdagangan dalam pengembangannya masih menghadapi permasalahan diantaranya :
1. Kurangnya sarana dan prasarana kemetrolgian.
  2. Kurangnya sumberdaya manusia kemetrolgian.
  3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem resi gudang.
  4. Belum terbentuknya pasar tertib ukur.
  5. Masihkurangnya kualitas produk unggulan yang berdaya saing.

6. Belum adanya pasar induk Kabupaten.
  7. Kurangnya pasilitas HAKI.
  8. Kurangnya fasilitas pemerintah daerah dalam perdagangan ekspor.
  9. Kurangnya promosi dan misi dagang ke luar negeri .
  10. Belum ada penataan dan pembudayaan PKL.
- Bidang Pasar dalam pengembangannya masih menghadapi permasalahan diantaranya :
1. Keterbatasan SDM UPT Pasar baik secara kuantitatif maupun kualitatif
  2. Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana utama dan sarana pendukung pasar masih terbatas, (kios, Los, lapak PKL, TPS Pasar, Kantor dan mebel UPT pasar, Peralatan sampah dll)
  3. Belum tersedianya data base pasar yang lengkap yang menggambarkan data jumlah pasar beserta sarana prasarana, jumlah pedagang, jumlah pengelola pasar pada kondisi eksisting dan kondisi pasar kedepannya sebagai bahan perencanaan selanjutnya baik pasar Kabupaten maupun pasar milik Desa by name by address.
  4. Belum tersedianya pemetaan lokasi-lokasi untuk penampungan PKL yang sesuai dengan konsep penataan ruang daerah.
  5. Belum tersedianya lahan untuk menempatkan PKL dilokasi yang strategis dan tidak mengganggu ketertiban umum.
  6. Keberadaan Pasar Tradisional masih jauh ketinggalan untuk mampu bersaing dengan pasar dan atau Tokok Moderen dari aspek tempat yang strategis, aspek manajemen pengelolaan, aspek kenyamanan dan kebersihan pasar dan lingkungannya, akan tetapi untuk aspek harga di pasar tradisional masih mampu kompetitif.
  7. Belum sinergisnya koordinasi lintas sektor dan lintas sektor dan lintas program terkait membangun satu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui perwujudan pengelolaan pasar tradisional yang bersih dan nyaman.

8. Masih rendahnya kesadaran warga pasar untuk menciptakan suasana pasar yang nyaman dan bersih serta masih kurangnya kesadaran warga pasar untuk membayar Retribusi.

#### 2.4 Prioritas Program dan Pembangunan Tahun 2017

Berikut ini adalah Program Prioritas Pembangunan Tahun 2017 yang menjadi Program Prioritas SKPD :

1. Program Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Pengembangan industri kecil dan menengah
4. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
5. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
6. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
7. Program peningkatan dan pengembangan ekspor

#### 2.5 Rencana Kegiatan Tahun 2017

Berikut ini adalah Rencana kegiatan pada tahun 2017 yang dilengkapi dengan lokasi dan jumlah dana.

No.	Usulan Kegiatan	Lokasi	Jumlah
A	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Rp. 55.800.000
2	Penyediaan alat tulis kantor		Rp. 20.911.200
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Rp. 50.000.000
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor		Rp. 6000.000
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang-undangan		Rp. 9000.000
6	Penyediaan makan dan minum		Rp. 20.000.000
7	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran		Rp. 361.918.800

8	Penyediaan jasa pengamanan kantor		Rp. 93.600.000
9	Penyediaan jasa gedung kantor		Rp. 13.770.000
10	Rapat –Rapat koordinasi dan konsultasi		Rp. 60.000.000
B	<b>Program Peningkatan sarana Prasarana aparatur</b>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
1	Pengadaan Komputer		Rp. 20.000.000
2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		Rp. 10.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional		Rp. 124.000.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Rp. 5.000.000
C	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>		
1	Sosialisasi perlindungan konsumen	Kab. Tasikmalaya	Rp. 25.000.000
2	Monitoring harga dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya	Kab. Tasikmalaya	Rp. 25.000.000
3	Pelaksanaan tera ulang		Rp. 100.000.000
4	Penyusunan peraturan daerah tentang metrologi	Kab. Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya	Rp. 150.000.000
D	<b>Program Pengembangan industri kecil dan menengah</b>		
1	Pelatihan diversifikasi produk border	Kec. Sukaraja	Rp. 70.000.000
2	Pengembangan desain anyaman Pandan mending dan bamboo	Kec. Rajapolah, Manonjaya, dan Leuwisari	Rp. 150.000.000
3	Sosialisai penerapan konvensi gugus kendali mutu (GKM)	Kab. Tasikmalaya	Rp. 75.000.000
4	Pelatihan diservikasi motif tenun kain	Kec. Sukaresik	Rp. 50.000.000
5	Pendamping dan penunjang P2WKSS	Kec. Jatiwaras	Rp. 50.000.000
6	Pendampingan sertifikasi halal	Kota Bandung	Rp. 55.000.000
7	Pelatihan pengolahan minyak kelapa	Kec. Cineam dan Cibalong	Rp. 50.000.000
8	Pelatihan pengolahan tempurung kelapa	Kec. Cicalong	Rp. 50.000.000
9	Bimbingan teknis desain kemasan	Kec. Kadipaten dan Bojongsambir	Rp. 50.000.000



E	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>		
1	Bimbingan teknis ekspor impor	Kab. Tasikmalaya	Rp. 50.000.000
E	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>		
1	Fasilitasi kepemilikan HAKI bagi Indutsri kecil dan menengah (DBHCHT 2017)	Kab. Tasikmalaya	Rp. 150.000.000
F	<b>Program Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri</b>		
1	Promosi produk unggulan Kabupaten Tasikmalaya	Bandung dan Jakarta	Rp. 275.000.000
2	Pelaksanaan oprasi pasar murah	Kab. Tasikmalaya	Rp. 75.000.000
3	Revitalisai pasar rakyat Kabupaten Tasikmalaya (DAK 2017)	Desa Burujuljaya Kec. Parungponteng	Rp. 1.538.000.000
4	Rehabilitasi pasar singaparna	Kec. Singaparna	Rp. 250.000.000
5	Pembebasan lahan Pasar Manonjaya	Kec. Manonjaya	Rp.2.000.000.000
6	Sosialisai peraturan daerah tentang pedagang kaki lima (PKL)	Kab. Tasikmalaya	Rp. 25.000.000
7	Pembinaan bagi Para Pedagang	Kab. Tasikmalaya	Rp. 250.000.000
8	Sosialisasi Aku Cinta Indonesia (ACI)	Kab. Tasikmalaya	Rp. 250.000.000
9	Pengadaan sarana Kebersihan Pasar	Pasar Kabupaten	Rp. 25.000.000
10	Penyusunan Feasibility Study Pasar Karangnunggal	Kec. Karangnunggal	Rp. 500.000.000
11	Penyusunan audio visual	Kab. Tasikmalaya	Rp. 500.000.000

## BAB III

### KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN RENCANA

#### 3.1 Program/kegiatan Perindag Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

Bahwa kedudukan Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017 seperti tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) yaitu:

✓ **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**

Adapun indikasi kegiatannya meliputi :

- a. Pengadaan komputer;
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- e. Penataan sarana dan prasarana gedungkantor.

✓ **Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran**

Adapun indikasi kegiatannya meliputi :

- a. [enyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan alat tulis kantor;
- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- e. Penyediaan barang cetakan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyediaan makanan dan minuman;
- g. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;
- h. Penyediaan jasa pengaman kantor;
- i. Penyediaan jasa gedung kantor;

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

✓ **Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD**

Adapun indikasi kegiatannya meliputi :

a. Indikasi Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.

✓ **Pengembangann Industri Kecil dan Menengah**

Adapun indikasi kegiatannya meliputi :

a. Pelatihan dan pengembangan industri kecil bordir

b. Pengembangan desain anyaman pandan, mendong dan bambu

c. Sosialisasi penerapan konvensi gugus kendali mutu (GKM)

d. Pelatihan diversifikasi motif tenun

e. Pendamping dan penunangan P2WKSS

f. Pelatihan pengolahan minyak kelapa

g. Pelatihan pengolahan tempurung kelapa

h. Bimbingan teknis desain kemasan implementasi gugus kendali mutu (GKM)

i. Pengembangan kawasan ekonomi kreatif

j. Peningkatan kemampuan pengolahan kelapa terpadu

k. Peningkatan kemampuan pengolahan dan desain kemasan makanan

l. Pencetakan wirausaha (WUB)

m. Peningkatan kemampuan dan pengadaan peralatan produksi makanan olahan

n. Peningkatan kemampuan dan pengadaan peralatan produksi IK gula

o. Peningkatan kemampuan bagi pelaku home industri

p. Rapat koordinasi bidang industri agro

q. Rapat koordinasi bidang industri non agro

✓ Peningkatan efisiensi Perdagangan dalam Negeri

Adapun indikasi kegiatannya meliputi :

- a. Sosialisasi peraturan daerah tentang pedagang kaki lima (PKL)
- b. Pembinaan bagi para pedagang
- c. Sosialisasi aku cinta indonesia (ACI)
- d. Penyusunan audio visual
- e. Strategi pemasaran
- f. Manajemen perdagangan eceran
- g. Diklat teknis perencanaan bisnis
- h. Sosialisasi permendag No. 15 Tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- i. Bimbingan teknis manajemen pengolahan usaha yang profesional bagi para pedagang
- j. Pembinaan bagi para pedagang pasar dan PKL
- k. Pengadaan runing text
- l. Pembinaan bagi para pedagang asongan
- m. Penyusunan dokumen UKL/UPL dan amdal
- n. Optimalisasi pasar Cikatomas
- o. Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan penataan lingkungan pasar
- p. Diklat manajemen pasar
- q. Diklat pelayanan strategis penetapan harga
- r. Diklat strategi penggunaan merek.

✓ Program Pengembangan Industri kecil dan menengah

Adapun indikasi kegiatannya meliputi :

- a. Pelatihan dan pengembangan industri kecil bordir
- b. Pengembangan desain anyaman pandan, mendong dan bambu

- c. Pelatihan diversifikasi motif tenun
- d. Pendamping dan penunjang P2WKSS
- e. Pelatihan pengolahan minyak kelapa
- f. Pelatihan pengolahan tempurung kelapa
- g. Bimbingan teknis desain kemasan implementasi gugus kendali mutu(GKM)
- h. Pengembangan kawasan ekonomi kreatif
- i. Peningkatan kemampuan pengolahan kelapa terpadu
- j. Peningkatan kemampuan pengolahan dan desain kemasan makanan
- k. Pencetakan wirausaha baru (WUB)
- l. Peningkatan kemampuan dan pengadaan peralatan produksi makanan olahan
- m. Peningkatan kemampuan dan pengadaan peralatan produksi IK Gula
- n. Peningkatan kemampuan bagi pelaku home industri
- ✓ Peningkatan kemampuan teknologi industri  
Adapun indikasi kegiatannya meliputi :
  - a. Fasilitas pengembangan industri tembakau (DBHCHT)
  - b. Penyediaan peralatan industri olahan gula aren
  - c. Penyediaan peralatan industri olahan karet
  - d. Penyediaan peralatan industri olahan teh
  - e. Penyediaan peralatan industri olahan kopi
  - f. Penyediaan peralatan industri bordir
- ✓ Pengembangan sentra-sentra industri fotensial
  - a. Peningkatan kemampuan dan desain kerajinan bordir
  - b. peningkatan kemampuan dan desain kerajinan batik

- c. peningkatan manajemen dan desain produk kerajinan anyaman
- d. pembangunan gapura sentra industri
- e. penataan tempat penjualan produk pandai besi
- f. pembangunan show room sentra industri bordir
- g. pembangunan outlet sentra industri kerajinan dan makanan
- h. pembinaan kelembagaan usaha sentra industri potensial
- ✓ program penataan struktur industri
  - a. achievement motivation training training (AMT)kerajinan
  - b. penyusunan rencana pengembangan industri kabupaten (RPIK)
- ✓ peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
  - a. pelaksanaan operasi pasar murah
  - b. pembinaan bagi para pedagang
  - c. sosialisasi aku cinta indonesia (ACI)
  - d. Strategi pemasaran
  - e. Manajemen perdagangan eceran
  - f. Bimbingan teknis manajemen pengelolaan usaha yang profesional bagi para pedagang.
  - g. Pembinaan bagi para pedagang pasar dan PKL
  - h. Pembinaan bagi pedagang asongan
  - i. Diklat strategi penggunaan merek
- ✓ Pengembangan industri kecil dan menengah
  - a. Pelatihan dan pengembangan industri kecil bordir
  - b. Pengembangan desain anyaman pandan, mendong dan bambu
  - c. Sosialisasi penerapan konvensi gugus kendali mutu (GKM)
  - d. Pelatihan diversifikasi motif tenun
  - e. Pendamping dan penunjang P2WKSS
  - f. Pelatihan pengolahan minyak kelapa

- g. Pelatihan pengolahan tempurung kelapa
- h. Bimbingan teknis desain kemasan implementasi gugus kendali mutu (GKM)
- i. Pengembangan kawasan ekonomi kreatif
- j. Peningkatan kemampuan pengolahan kelapa terpadu
- k. Peningkatan kemampuan pengolahan dan desain kemasan makanan
- l. Pencetakan wirausaha baru (WUB)
- m. Peningkatan kemampuan dan pengadaan peralatan produksi makanan olahan
- n. Peningkatan kemampuan dan pengadaan peralatan produksi IK Gula
- o. Peningkatan kemampuan bagi pelaku home industri
- ✓ Peningkatan kemampuan teknologi industri
  - a. Fasilitas kepemilikan HAKI bagi industri kecil dan menengah (DBHCHT 2017)
  - b. Fasilitas pengembangan industri tembakau (DBHCHT)
  - c. Penyediaan peralatan industri olahan gula aren
  - d. Penyediaan peralatan industri olahan karet
  - e. Penyediaan peralatan industri olahan teh
  - f. Penyediaan peralatan industri olahan kopi
  - g. Penyediaan peralatan industri bordir
- ✓ Pengembangan sentra-sentra industri fotensial
  - a. Peningkatan kemampuan dan desain kerajinan bordir
  - b. peningkatan kemampuan dan desain kerajinan batik
  - c. peningkatan manajemen dan desain produk kerajinan anyaman
  - d. pembinaan kelembagaan usaha sentra industri potensial

- ✓ Peningkatan pengembangan ekspor
  - a. bimbingan teknis ekspor impor
  - b. pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
  - c. fasilitas bimbingan teknis ekspor impor bagi calon pengusaha dan eksportir
  - d. bintek perdagangan luar negeri
  - e. promosi produk unggulan kabupaten tasikmalaya
  - f. monitoring dan evaluasi manajemen pengelola ekspor dan impor
  
- ✓ peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
  - a. promosi produk unggulan kabupaten tasikmalaya
  - b. Promosi produk unggulan aren kab. Tasikmalaya
  - c. Pembangunan gedung promosi (Gedung Dekranasda)
  
- ✓ Pengembangan sentra-sentra industri fotensial
 

Adapun indikasi kegiatannya adalah :

  - a. pembangunan gapura sentra industri
  - b. penataan tempat penjualan produk pandai besi
  - c. pembangunan show room sentra industri bordir
  - d. pembangunan outlet sentra industri kerajinan dan makanan
  
- ✓ Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 

Adapun indikasi kegiatannya meliputi :

  - a. revitalisasi pasar rakyat kabupaten tasikmalaya(DAK 2017)
  - b. rehabilitasi pasar singaparna
  - c. pembebasan lahan pasar manonjaya
  - d. Pengadaan sarana kebersihan pasar
  - e. Pembangunan pasar desa leuwisari



- f. Pembangunan pasar tematik
- g. Rehabilitasi pasar tradisional
- h. Pembangunan pasar tradisional
- i. Revitalisasi pasar rajapolah
- j. Revitalisasi pasar rakyat
- k. Pematangan lahan pasar singaparna
- l. Pematangan lahan pasar manonjaya
- m. Pembebasan lahan pasar manonjaya
- n. Pembangunan pasar singaparna
- o. Pembangunan pasar manonjaya
- p. Pembebasan lahan pasar singaparna (lanjutan)
- q. Penyusunan dokumen UKL / UPL dan amdal
- r. Pembebasan lahan pasar karangnunggal
- s. Optimalisasi pasar cikatomas
- t. Rehabilitasi pasar taraju
- u. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pasar
- v. Pembangunan benteng pasar cikatomas
- w. Pembangunan gedung promosi (Gedung Dekranasda)
- ✓ program penataan struktur industri
  - a. achievement motivation training training (AMT)kerajinan
  - b. fasilitasi sertifikat halal
  - c. fasilitasi pangan industri rumah tangga (PIRT)
  - d. penyusunan rencana pengembangan industri kabupaten (RPIK)
  - e. pemuktahiran validitas data industri
- ✓ Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
  - a. Sosialisasi perlindungan konsumen

- b. Monitoring harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya.
- c. Pelaksanaan tera ulang
- d. Penyusunan peraturan daerah tentang metrologi
- e. Pengawasan barang beredar
- f. Pembangunan gedung metrologi dan pengadaan peralatan dan perlengkapan penunjang.
- g. Diklat strategi pelayanan pelanggan.

### **3.2 Sasaran Kinerja Tahun Anggaran Berjalan**

Berdasarkan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa dalam Rencana kerja Tahun 2017 SKPD lebih menitik berat pada misi ke 2 dan program Prioritas Bupati Tasik Siap 3, sasaran yang direncanakan untuk mencapai tujuan :

- Kebutuhan dan penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi untuk menghadapi tuntutan dan permasalahan di masing-masing bidang.
- Kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi Asean Free Trade Agreement (AFTA) dan Asean Economy Community (AEC/ MEA);
- Penumbuhan dan pengembangan pusat perdagangan di Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya;
- Kurangnya sarana prasarana dalam mendukung kinerja dan layanan pembinaan terhadap dunia usaha;
- Mengoptimalkan regulasi Otonomi Daerah yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dalam memanfaatkan pangsa pasar yang semakin terbuka;

- Pasar yang semakin terbuka dan memberi peluang terhadap lapangan kerja;
- Dibangunnya kemitraan dan penggunaan teknologi dalam mengantisipasi pasar yang semakin kompetitif dengan memanfaatkan potensi usaha;
- Ditingkatkannya sarana prasarana advokasi perdagangan ditempat-tempat strategis dalam memenuhi tuntutan pasar dan minat transaksi yang semakin berkembang;
- Adanya lembaga keuangan alternatif yang dapat mengantisipasi permasalahan kebutuhan pendanaan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- Meningkatkan system dan jaringan distribusi barang pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen.

Tasik Siap 3 yaitu berdaya saing di bidang agribisnis Pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.

- Meningkatnya Industri Menengah dan kecil dalam bidang pengolahan hasil pertanian (Pasca Panen);
- Pengembangan destinasi tujuan wisata dan jasa pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian Ekonomi kreatif.

### **3.3 Kebijakan SKPD Tahun Rencana**

Setelah mempertimbangkan dari berbagai faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perindag yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis, sehingga diperoleh informasi tentang apa saja kebijakan yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017-2021 adalah:

1. Kebutuhan dan penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi untuk menghadapi tuntutan dan permasalahan di masing-masing bidang;
2. Kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) dan Asean Economic Community (AEC)/Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
3. Penumbuhan dan pengembangan pusat perdagangan di Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya;

4. Kurangnya sarana prasarana dalam mendukung kinerja dan pelayanan pembinaan terhadap dunia usaha;
5. Meningkatkan pemanfaatan data base dan aplikasinya untuk memenuhi pelayanan Perindustrian dan Perdagangan dalam mengoptimalkan potensi usaha;
6. Mengoptimalkan regulasi Otonomi Daerah yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dalam memanfaatkan pangsa pasar yang semakin terbuka dan memberi peluang terhadap lapangan kerja;
7. Dibangunnya kemitraan dan penggunaan teknologi dalam mengantisipasi pasar yang semakin kompetitif dengan memanfaatkan potensi usaha;
8. Ditingkatkannya sarana prasarana dan advokasi perdagangan di tempat-tempat strategis dalam memenuhi tuntutan pasar dan minat transaksi yang semakin berkembang;
9. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen.

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD adalah merupakan penjabaran dari Renstra SKPD, yang berisi indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, sehingga dalam tahap implementasinya, diharapkan semua pihak konsisten dengan kesepakatan yang telah dibangun melalui Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya 2017 - 2021.

Dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, diharapkan kegiatan-kegiatan pembangunan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun serta terintegrasi antara satu program dengan program yang lainnya, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan pembangunan masyarakat yang memang dirasakan sangat *Complicated* dan terkait erat satu dengan yang lainnya.

Untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Dinas diperlukan kesamaan pemahaman terhadap penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD dan Renstra SKPD sehingga tidak terjadi ketimpangan kegiatan dibidang teknis yang akan berdampak terutama pada pencapaian target kinerja sasaran yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Semoga Rencana kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikamalaya.